

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan suatu wadah penyelenggaraan kedaulatan rakyat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam undang-undang juga tertera bahwa pemilu diselenggarakan secara efektif dan efisien yang berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu adalah salah satu dasar dalam demokrasi yaitu sebagai wujud kedaulatan rakyat untuk mewujudkan suatu pemerintahan yang demokratis di mana rakyat juga ikut berperan dalam menentukan kebijakan politik pada suatu negara (Nidia & Maharani, 2018:331). Berdasarkan UU No 42 Tahun 2008 terkait Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 1 ayat (1) mengatakan bahwa “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemilihan umum untuk menentukan hak pilih atau memilih Presiden dan Wakil Presiden yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945” (Ferdianto, 2020:11) .

Partisipasi politik masyarakat dapat menjadi sebuah sarana untuk masyarakat dalam pemilu dan untuk memonitor proses terpilihnya para calon yang akan menjabat di pemerintahan. Dalam hal ini masyarakat bebas untuk menentukan pilihan serta amanahnya kepada calon kandidat yang menurut mereka dapat memastikan untuk menjalankan suatu tugas pemerintahan dimasa depan. Selain itu, partisipasi politik masyarakat juga sebagai alat untuk mengekspresikan eksistensi suatu individu maupun kelompok sosial di masyarakat dengan mempengaruhi pemerintah melalui proses politik (Putri, 2016:23). Masalah partisipasi politik di Indonesia sendiri masih terjadi pasang surut. Rendahnya partisipasi politik masyarakat ini terbukti pada pelaksanaan pemilu presiden tahun 2014 yaitu sebesar 69,58 persen sedangkan pada pilpres 2009 sebesar 71,17 persen. Hal tersebut mengalami penurunan partisipasi politik pada masyarakat (Detik.com). Rendahnya partisipasi masyarakat ini menjadi permasalahan yang serius dan harus cepat diatasi untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat (Husna & Fahrimal, 2021:87).

Faktor yang menyebabkan orang tidak ikut berperan serta dalam politik adalah menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai politik maupun calon peserta dalam pemilu, maraknya terjadi money politik di masyarakat, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai politik. Terjadinya penurunan angka partisipasi politik masyarakat ini karena adanya pengaruh dari kurangnya tingkat pemahaman mengenai permasalahan politik dan kejemuan pada suatu proses demokrasi yang dinilai tidak dapat memberikan dampak yang signifikan untuk warganya. Masyarakat juga berasumsi bahwa sistem politik bukan urusan mereka, tetapi urusan pemerintah. Para aktor politik yang telah dipilih dinilai hanya memperkaya untuk kepentingan pribadi bukan atas kepentingan rakyat. Sehingga adanya rasa kekecewaan terhadap politik yang dirasakan dan kemudian menjadi sikap yang apatis terhadap politik (Husna & Fahrimal, 2021:87).

Demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan hanya untuk rakyat. Pada sistem demokrasi ini dinilai positif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk berperan dalam kegiatan yang berkaitan dengan politik (Zubaidah & Munadi, 2020:65). Dalam hal penyelenggaraan pemilihan umum sangat erat dengan peran dari lembaga Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik dalam tingkat pusat ataupun daerah. Pada pelaksanaan pemilu tentunya harus berpedoman pada asas seperti jujur, mandiri, adil, transparan, bertanggung jawab dan efektif supaya menjadikan pemilu yang berjalan secara demokratis (Ferdiyanto, 2020:3).

Pada sifat nasional menggambarkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum meliputi seluruh wilayah Indonesia dari Ujung sampai marauke (Putri, 2016:34). Tugas dan wewenang KPU yaitu: merencanakan dan menyiapkan penyelenggaraan pemilihan umum; serta menentukan partai-partai politik yang berhak sebagai calon peserta pemilu; membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang kemudian digantikan PPI dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum dimulai dari tingkat Pusat sampai TPS (Tempat Pemungutan Suara); dan melakukan sosialisasi terkait penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkaitan dengan tugas serta wewenang KPU kepada masyarakat hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilihan masyarakat pada pelaksanaan pemilihan umum (Yusuf, 2010:14).

**Ririn Afrizka, 2022**

*Peran KPU Kota Tangerang Dalam Membangun Budaya Politik Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres 2019*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik  
[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Pada hal ini alasan peneliti memilih KPU Kota Tangerang karena KPU Kota Tangerang dinilai telah sukses dalam menyelenggarakan pemilu pada 2019. Hal ini terbukti KPU Kota Tangerang mendapatkan penghargaan sebanyak 6 penghargaan yang diadakan oleh KPU Provinsi Banten pada Rapat Evaluasi Pemilu 2019. Mengutip dari beritatangerang.id diakses pada tanggal 10 April 2022 menjelaskan “ Adapun 6 penghargaan tersebut, dan diantaranya terkait pemilu yaitu peringkat I terbaik pada kategori Kreasi Sosialisasi dan Partisipasi Pemilu 2019, peringkat I terbaik pada kategori Kemudahan Akses Pemilih Disabilitas, peringkat II terbaik pada kategori Tranparansi Informasi Pemilu dan Pemilihan, dan peringkat III terbaik pada kategori Iklan Layanan Masyarakat (Kreatif dan Informatif)”. Dari beberapa penghargaan yang disebutkan dan diberikan untuk KPU Kota Tangerang merupakan upaya KPU Kota Tangerang untuk memajukan partisipasi politik masyarakat (Gintara, 2019:55).

Pada pelaksanaan pilpres 2019 Kota Tangerang berdasarkan hasil rekap data KPU, terdiri dari 13 kecamatan, 104 kelurahan, dengan jumlah TPS sebanyak 5,085, dengan total pemilih laki-laki sebanyak 597,598, dan total pemilih perempuan sebanyak 596,771, maka total jumlah pemilih sebanyak 1,194,369. Mengutip dari merdeka.com diakses pada 10 April 2022 menjelaskan Pada hal ini jumlah DPT pada tahun 2019 mengalami penurunan hal ini disebabkan oleh daftar pemilih tidak memenuhi syarat dan jumlah pemilih tersebut terdiri dari pemilih ganda, meninggal dunia serta pemilih yang tidak ditemukan (merdeka.com).

Jika kita lihat perbandingan partisipasi politik pada pilpres 2014 dan 2019 yaitu sebagai berikut:

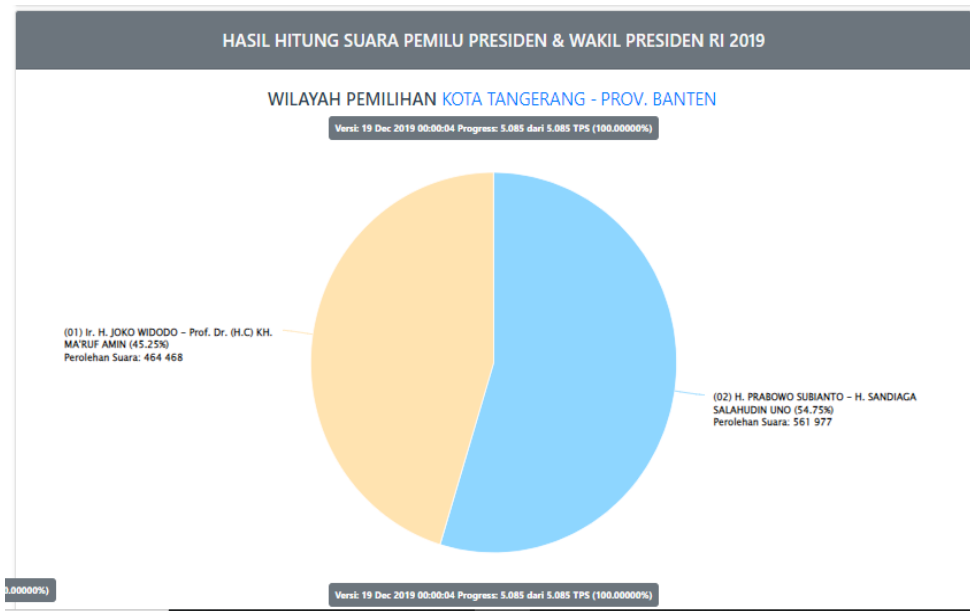
**Table 1 Presentase Perbandingan Peningkatan partisipasi politik Pilpres 2014 dan 2019**

<b>Tahun</b>	<b>JUMLAH PEMILIH DPT</b>	<b>JUMLAH PENGGUNA HAK PILIH</b>	<b>JUMLAH %</b>
2014	1.259,879	873,501	69,33%
2019	1.194,369	953,248	79,81%

Sumber: Web KPU setelah diolah

Berdasarkan tabel diatas terdapat peningkatan pada pelaksanaan pilpres 2019 di wilayah Kota Tangerang. Menurut hasil perhitungan suara di Kota Tangerang pada pilpres 2019 di menangkan oleh calon pasangan nomor urut 02 yaitu Prabowo-Sandi dengan perolehan suara sebanyak 561.977 suara sekitar 54.75 persen sedangkan calon pasangan nomor urut 01 yaitu Jokowi-Ma'aruf dengan perolehan suara sebanyak 464.468 suara sekitar 45.25 persen dari total TPS 5.085. Tidak hanya di Kota Tangerang yang mengalami peningkatan partisipasi pemilih, namun semua wilayah di provinsi Banten mengalami peningkatan pada Pilpres 2019. Namun, disini lain jumlah pemilih di wilayah kota Tangerang mengalami menurunan sekitar 65.510 ribu karena disebabkan oleh daftar pemilih tidak memenuhi syarat dan jumlah pemilih tersebut terdiri dari pemilih ganda, meninggal dunia serta pemilih yang tidak ditemukan. Hal tersebut lah yang membuat peneliti tertarik untuk memilih penelitian di wilayah Kota Tangerang.

Gambar 1. Hasil Perolehan Pilpres 2019 di Kota Tangerang



Sumber: Website KPU

Fenomena adanya peningkatan partisipasi politik di Kota Tangerang pada pelaksanaan pilpres 2019 ternyata juga menunjukkan bahwa pilpres 2019 merupakan pilpres dengan partisipasi pemilih paling tinggi serta angka golput

Ririn Afrizka, 2022

*Peran KPU Kota Tangerang Dalam Membangun Budaya Politik Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres 2019*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, S1 Ilmu Politik  
 [www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

yang rendah yaitu sekitar 19,24 persen (beritasatu.com). Selain dari adanya peran KPU yang mensukseskan jalannya Pilpres 2019 ini, ada keterkaitan yang juga membantu yakni jajaran pemerintah daerah Kota Tangerang, DPRD Kota Tangerang, TNI/POLRI, Penegak Hukum, LSM, Pemantau Pemilu, Pengawas Pemilu, Masyarakat serta semua jajaran penyelenggara yang meliputi, PPK, PPS, dan KPPS.

Karena adanya peran KPU Kota Tangerang dan peningkatan partisipasi politik di Kota Tangerang ini juga berdampak baik pada budaya politik masyarakat. Budaya politik merupakan suatu unsur politik yang berasal dari system nilai-nilai yang berkembang pada masyarakat dan dipengaruhi oleh zaman saat itu serta Pendidikan dari masyarakat itu sendiri. Yang berarti bahwa tingkat kesadaran dalam berpolitik pada masyarakat di wilayah Kota Tangerang sangat baik baik berupa pengetahuan dan Pendidikan terkait politik mereka dapat aplikasikan pada pelaksanaan Pilpres 2019. Dan masyarakat juga dapat menilai kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah baik itu mendukung atau menentang kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dengan melakukan penyampaian aksi demo dengan tujuan suara mereka dapat didengar. Maka dari itu , penelitian ini sangat menarik penulis untuk diteliti, karena seperti yang kita ketahui bahwa peran Lembaga KPU sangat penting dalam penyelenggaraan pemilu serta membangun budaya politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik pada pelaksanaan pilpres 2019 di wilayah Kota Tangerang.

Pada penelitian ini, penulis akan mengkaji beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa sebagai tolak ukur penelitian serta untuk memperdalam topik penelitian. Pada tinjauan pustaka berisi mengenai ringkasan mengenai sebuah tema dari beberapa jurnal atau buku dan juga dokumen-dokumen lainnya, yang membahas teori-teori dan konsep serta informasi yang terdahulu maupun masa saat ini, kemudian memasukkan pustaka ke dalam topik proposal penelitian. Peneliti biasanya menggunakan literatur yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku ilmiah, tesis dan disertai karangan-karangan ilmiah, sumber-sumber yang tercetak ataupun elektronik, dan lain-lain. Pada penelitian yang bertema peran Lembaga untuk meningkatkan pasrtisipasi politik masyarakat, penulis melakukan

tinjauan pustaka terhadap tema yang terkait, untuk memperluas wawasan mengenai Peran KPU dalam meningkatkan partisipasi politik pada pilpres 2019.

Tinjauan yang pertama adalah skripsi yang berjudul **“Peran Relawan Demokrasi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Kabupaten Kudus Pada Pemilihan Presiden Tahun 2019”** oleh Ridwan Ferdianto pada Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, pada tahun 2020. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa relawan demokrasi memiliki peran untuk melakukan sosialisasi dan Pendidikan pemilih pada pilpres 2019 dengan memberikan informasi mengenai pelaksanaan pemilu dan mengajak masyarakat menjadi pemilih yang cerdas. Pada penelitian ini Target sosialisasi ini yaitu; keluarga , pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih penyandang disabilitas, pemilih berkebutuhan khusus, pemilih marginal, komunitas keagamaan dan warga internet. Adanya faktor penghambat internal yaitu keterbatasan jumlah relawan demokrasi, kurangnya pemahaman mengenai pemilu, kesibukan pribadi relawan, latar belakang Pendidikan yang beragam serta keterbatasan dana. Kemudian faktor penghambat dari eksternal yaitu cuaca dan adanya penolakan dari masyarakat.

Pada penelitian tersebut memfokuskan pada relawan demokrasi untuk memberikan informasi terkait pelaksanaan pilpres 2019. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah peneliti berfokus pada peran KPU Kota Tangerang dalam membangun budaya politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat terkait pilpres 2019 (Ferdianto, 2020:32).

Tinjauan yang kedua adalah jurnal yang berjudul **“Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tuban Dalam Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat”** oleh Moh. Wazid Husni pada Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 9 Nomor 2. Pada tahun 2021. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Tuban yaitu sosialisasi politik, Pendidikan politik bagi pemilih pemula serta pembentukan relawan demokrasi. Adanya peningkatan partisipasi politik masyarakat Tuban dipengaruhi

oleh kegiatan dan program-program yang dilakukan oleh KPU di Kabupaten Tuban (Husni & Harmanto, 2021:11).

Pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan peneliti yang akan dilakukan yaitu seperti teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori belajar politik behavior guna untuk menganalisis bahwa Pendidikan politik dapat mempengaruhi sikap dan perilaku dalam partisipasi politik pada pelaksanaan pemilu 2019.

Tinjauan yang ketiga adalah jurnal yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Sosialisasi Pemilu Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur”** oleh Masleka Pratama Putri pada Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 4 Nomor 1. Pada tahun 2016. Hasil penelitian mengatakan bahwa peran KPU dalam sosialisasi pemilu untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pilpres 2014 di Kalimantan Timur dengan melakukan kegiatan sosialisasi interaksional ( dilakukan dalam banyak program dan melibatkan beberapa elemen lapisan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan edukasi serta informasi terkait pelaksanaan pemilu) dan sosialisasi directional (media seperti poster, brosur, spanduk, maupun media informasi public seperti iklan layanan masyarakat melalui televisi, radio dan media cetak) (Putri, 2016:6)

Tinjauan yang keempat adalah jurnal yang berjudul **“Peranan Komisi Pemilihan Umum dalam Melaksanakan Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula di Kabupaten Gowa”** oleh Rismawati dan Mardiana pada Jurnal Etika Demokrasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 3 No 2, pada tahun 2018. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa KPU berperan untuk melakukan kegiatan Pendidikan politik di Kabupaten Gowa dengan metode yaitu: 1). Melakukan sosialisasi untuk pemilih pemula dengan program road to school dan adanya kegiatan gerak jalan santai; 2). Melakukan penyebaran informasi dengan melalui alat-alat peraga; 3). Sosialisasi melalui media massa; 4). Adanya program relawan demokrasi (Relasi); 5). Sosialisasi dengan mobil keliling; 6). Workshop serta; 7). Adanya kegiatan lomba penulisan esai dan debat siswa. Dalam melakukan kegiatan untuk Pendidikan politik dipengaruhi oleh dua factor

yaitu factor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya seperti SDM yang memadai dan adanya Kerjasama dengan masyarakat serta instansi Pendidikan. Sedangkan faktor penghambatnya seperti letak geografis, masih kurangnya kesadaran politik serta kurang memadai anggaran yang diberikan oleh pemerintah (Rismawati & Mardiana, 2018:14)

Tinjauan yang kelima adalah jurnal yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam Pendidikan Politik Untuk Masyarakat pada Pemilu Serentak 2019”** oleh Duwi Zubaidah dan Munadi pada Jurnal Unnes Political Science, Vol 4 No 1, pada tahun 2020. Hasil penelitian tersebut mengatakan bahwa KPU Kabupaten Wonosobo memiliki peran yang sangat penting terutama dalam Pendidikan politik dengan tujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan pemilu 2019. Dengan melakukan tahapan sosialisasi yang meliputi yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan KPU menentukan dan Menyusun target sosialisasi. Kemudian KPU Menyusun bagaimana metode sosialisasi yang akan diimplementasikan dengan sesuai target sosialisasi baik itu secara online maupun offline. Terakhir, pada tahap persiapan ini Menyusun materi untuk target sosialisasi. Sedangkan pada tahap pelaksanaan KPU melakukan sosialisasi dengan sesuai yang tertera pada tahap persiapan (Zubaidah & Munadi, 2020)

Tinjauan yang keenam adalah jurnal yang berjudul **“Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung”** oleh Yulia Sariwaty dan Dini Rahmawati pada Jurnal Signal, Volume 7 Nomor 2. Pada tahun 2019. Hasil penelitian mengatakan bahwa adanya rasa antusiasme pada kelompok marjinal untuk mengikuti sosialisasi serta diskusi pada saat kegiatan berlangsung. Adapun yang termasuk dalam kelompok marjinal pada penelitian ini adalah pedagang kaki lima (PKL), para pekerja seks komersial (PSK), gelandangan dan pengemis (gepeng), kaum waria, dan lain sebagainya. Metode yang dilakukan oleh KPU Kota Bandung dengan tatap muka secara langsung agar target sasaran kelompok marjinal percaya bahwa KPU sebagai penyelenggara legal kegiatan pemilu 2019 (Sariwaty & Rahmawati, 2019)



Tinjauan yang ketujuh adalah jurnal yang berjudul **“Strategi KPU Kota Sukabumi Dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Pemilih Melalui Rumah Pintar Pemilu Tahun 2019”** oleh Salsabila Tasya Aulia Reza, M. Rijal Amirullah dan Andi Mulyadi pada Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara, Vol.7 No. 2, pada tahun 2020. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa strategi yang dilakukan oleh KPU Kota Sukabumi dapat membantu untuk memberikan Pendidikan politik bagi pemilih dengan melalui RPP yaitu dengan melakukan penyebaran informasi melalui media sosial, melakukan kegiatan diskusi online serta mengeluarkan inovasi Pendidikan pemilih dengan melalui mobil cerdas demokrasi (Moci) (Reza et al., 2020:315).

Tinjauan yang kedelapan adalah jurnal yang berjudul **”Pendidikan Politik: Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Menggunakan Hak Pilihnya”** oleh Asmaul Husna dan Yuhdi Fahrimal pada Jurnal Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar, Vol 3 No 1, pada tahun 2021. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa dalam upaya meningkatkan partisipasi para pemilih pemula dengan cara memberikan Pendidikan politik kepada para pemilih pemula di Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan yang dilakukan ini diharapkan pemilih pemula dapat menjadi agen perubahan di lingkungannya sehingga menimbulkan kesadaran untuk hal yang berkaitan dengan politik (Husna & Fahrimal, 2021)

Tinjauan yang kesembilan adalah jurnal yang berjudul **“Analisis Dampak Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula di SMAN 1 Balauring Lembata NTT”** oleh Adnan Pattipeilohy, Nurbani Yusuf dan Trisakti Handayani pada Jurnal Civic Hukum, Vol 3 No 2, pada tahun 2018. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pendidikan politik merupakan bagian dari tanggung jawab KPU yang dilaksanakan di SMAN 1 Balauring yang dilakukan dengan metode sosialisasi kepada pemilih pemula dengan sasaran siswa-siswi yang sudah berusia 17 tahun keatas yang dilakukan dengan menyampaikan ke kelas-kelas oleh KPU dan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) (Pattipeilohy et al., 2018)

Tinjauan yang kesepuluh adalah jurnal yang berjudul **“Pendampingan Pendidikan Politik Untuk Generasi Muda Di Kota Jambi”** oleh Dori efendi dan Nopyandri pada Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.2 No.2, pada tahun 2019. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa Pendidikan politik memiliki peran yang penting untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan mengenai politik kepada generasi muda di kota Jambi. Sementara itu, Pendidikan politik juga dapat menghindari khususnya generasi muda dari politik kotor yang lebih bersifat negatif serta dapat memotivasi generasi muda untuk ikut serta dalam berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi (Efendi & Nopyandri, 2019)

Berdasarkan uraian dari tinjauan Pustaka yang telah disebutkan dan dijelaskan diatas, maka penelitian ini memiliki beberapa kebaruan dari penelitian terdahulu. Pertama, fokus objek penelitian yang berfokus pada KPU Kota Tangerang dalam berupaya untuk membangun budaya politik serta meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Kedua, mengenai konsep yang digunakan. Pada penelitian sekarang penulis menggunakan teori Peran, Sosialisasi Politik dan Partisipasi Politik serta Konsep budaya politik. Kemudian, perbedaan ketiga adalah fokus penelitian sekarang yaitu, peneliti berfokus pada Peran KPU Kota Tangerang dalam berupaya membangun budaya politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat di wilayah Kota Tangerang pada pelaksanaan pilpres 2019.

## **1.2 Rumusan Masalah**

**“Bagaimana Peran KPU Kota Tangerang Dalam Membangun Budaya Politik Masyarakat Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres 2019?”**

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran KPU Kota Tangerang Dalam Membangun Budaya Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Politik Pada Pilpres 2019.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Praktis

Secara Praktis hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan dan informasi bagi masyarakat mengenai peran yang dilakukan oleh Lembaga KPU Kota Tangerang dalam membangun budaya politik untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada pelaksanaan Pilpres 2019.

## 2. Manfaat Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya terutama mengenai peran Lembaga KPU serta menggunakan konsep dan dasar penelitian yang serupa, yaitu sosialisasi politik dan partisipasi politik, serta budaya politik.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini akan diuraikan untuk setiap babnya dan dapat diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang penelitian, rumusan pertanyaan penelitian juga meliputi tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II**

#### **KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini, menjelaskan mengenai tinjauan kepustakaan yang digunakan dalam penelitian dan konsep serta teori penelitian dan kerangka berfikir.

#### **BAB III**

#### **METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai konsep dan teknis penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data serta waktu dan lokasi penelitian.

#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini, akan menjelaskan peran yang dilakukan KPU Kota Tangerang dalam membangun budaya politik masyarakat untuk meningkatkan partisipasi politik pada pilpres 2019.

#### **IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

##### 4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 4.2 Peran KPU Kota Tangerang Pada Pilpres 2019

###### 4.2.1 Faktor – faktor Partisipasi Politik masyarakat pada pilpres 2019

###### 4.2.2 Kendala yang dihadapi serta solusi KPU Kota Tangerang

##### 4.3 Membangun Budaya Politik Masyarakat Kota Tangerang

## **BAB V**

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini, yang berisikan kesimpulan dari hasil dan penelitian yang telah dilakukan. Hasil simpulan akan disertakan juga dengan saran dan masukan untuk peneliti selanjutnya